

DCT DITETAPKAN 3 NOVEMBER 2023

Mayoritas Parpol Ajukan Perbaikan Bakal Caleg

YOGYA (KR) - Dari total 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 di Kota Yogya, mayoritas mengajukan perbaikan bakal calon legislatif (caleg) yang diusungnya untuk kursi DPRD Kota Yogya. Hanya ada lima parpol yang tidak merubah komposisi atau tetap seperti Daftar Calon Sementara (DCS) yang sudah ditetapkan KPU Kota Yogya pada Agustus 2023 silam.

Lima parpol yang memilih untuk tidak mengajukan perbaikan ialah Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda.

"Jadi ada 13 parpol yang mengajukan perbaikan bakal caleg. Pengajuan perbaikan itu sedang kami verifikasi," ungkap Komisiner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, Kamis (5/10).

Sesuai dengan ketentuan, DCS yang sudah ditetapkan masih

berpeluang untuk berubah. Terutama berdasarkan hasil pengajuan perbaikan yang dilakukan oleh parpol pengusung bakal caleg. Dengan catatan, pengajuan perbaikan tersebut harus dengan persetujuan oleh pimpinan pusat parpol masing-masing. Tanpa ada persetujuan dari pimpinan pusatnya, maka otomatis tidak dapat diajukan melalui sistem. Pengajuan perbaikan bakal caleg itu pun paling lambat pada 3 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB lalu. Erizal menambahkan, per-

baikan bakal caleg yang diajukan oleh parpol bentuknya bervariasi. Mulai dari perbaikan nama, foto dan gelar bakal caleg. Selain itu ada pula yang mengganti bakal caleg, nomor urut serta pindah daerah pemilihan (dakil).

"Tetapi kalau untuk menambah dari DCS yang sudah kami tetapkan, tidak bisa. Jadi jumlahnya tetap yakni 493 bakal caleg, hanya sebagian komposisinya akan berubah sesuai pengajuan perbaikan yang dilakukan oleh parpol," imbuhnya.

Dari pencermatan awal yang dilakukan oleh KPU, seluruh persyaratan terhadap nama-nama bakal caleg yang diajukan perbaikan, sudah sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi jajarannya masih akan tetap melakukan proses verifikasi hingga menyusun Daftar Calon Tetap (DCT). Sesuai

rencana, DCT akan ditetapkan pada 3 November 2023 mendatang. Hasil penetapan DCT itu akan digunakan sebagai dasar pencetakan surat suara. Jika dalam masa tersebut ada bakal caleg meninggal dunia, yang bersangkutan akan tetap tercetak dalam surat suara. Hanya, akan ada tanda khusus atau diumumkan di TPS setempat jika bakal caleg yang dimaksud telah meninggal dunia. Ketika kelak ada pemilih yang mencoblos, suaranya tetap sah namun masuk sebagai suara partai.

Terkait dengan mekanisme penentuan kursi pada Pemilu 2024, Erizal menjelaskan tetap menggunakan metode Sainte Lague seperti halnya Pemilu 2019 lalu. Hal ini karena tidak ada perubahan undang-undang maupun aturan baru yang mengatur hal tersebut. **(Dhi)-f**

KOMUNITAS PDNBP AUDIENSI KE KR Sosialisasi Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar



KR-Widyo Suprayogi

Kangjeng Eri menyerahkan buku kepada Direktur Keuangan KR Imam Satriadi SH.

YOGYA (KR) - Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar (PDNBP) terus mengencangkan sosialisasi dan mengkampanyekan Pancasila itu bukan pilar tapi dasar negara. Hal tersebut dilakukan untuk meluruskan penggunaan istilah 4 pilar yang tidak pada tempatnya.

"Harapannya, masyarakat semakin paham dan ini menjadi bagian proses penyadaran bersama tentang makna dan hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara benar," tutur koordinator Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar KRAP. Eri Ratmanto, saat audiensi dengan Direksi PT BP Kedaulatan Rakyat, di Yogya, Kamis (5/10).

Kangjeng Eri, demikian ia akrab disapa, hadir didampingi oleh sejumlah anggota Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar, dan diterima oleh Direktur Keuangan Imam Satriadi SH dan General Manager PT BP Kedaulatan Rakyat H Yoeke Indra Agung Laksana SE.

Pada kesempatan tersebut, Kangjeng Eri mengkritisi Pancasila yang selama ini dijadikan bagian dari 4 pilar MPR RI (sebelumnya 4 pilar berbangsa dan bernegara). MPR RI, kata dia, seharusnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.

Selain itu ia juga menyayangkan masih adanya pihak yang beranggapan hari lahirnya pancasila jatuh pada tanggal 22 Juni atau 18 Agustus. "Hari kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni," tandasnya.

Direktur Keuangan KR Imam Satriadi memberikan dukungan kepada komunitas untuk terus menyuarakan bahwa Pancasila sebagai Dasar NKRI dan tidak bisa dijadikan bagian pilar.

"KR sebagai pers perjuangan selalu mendukung upaya untuk meluruskan Pancasila sebagai dasar negara," ujarnya. **(Ogi)-f**

SD Muh Sapen Gelar Karnaval Budaya Nusantara

YOGYA (KR) - SD Muhammadiyah Sapen mengadakan karnaval budaya dalam rangka memeriahkan HUT ke-267 Kota Yogyakarta diikuti siswa kelas 1 hingga kelas 6. Peserta mengenakan berbagai busana Nusantara dimeriahkan figur tokoh peyangan seperti Rahwana, Gatotkaca, dan Rahwana.

Karnaval budaya dimulai seiring pembukaan Gebyar Literasi #8 oleh Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori SE MSi didampingi Kepala Bidang Pembinaan SD Mujiono SE MAcc di halaman SD Muhammadiyah Sapen, Rabu (4/10).

"Karnaval budaya merupakan salah satu media penanaman pendidikan karakter kepada peserta didik tentang pengenalan

busana daerah di Nusantara dan mencintai budaya nasional serta budaya sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari," kata Kepala SD Muhammadiyah Sapen, Agung Rahmanto.

Peserta karnaval juga membawa berbagai aneka permainan tradisional seperti othok-othok, lampion HUT Kota Yogya, logo ulat Kota Yogya, dan wayang serta makanan tradisional.

Salah seorang peserta karnaval, Tengku Almahyra Paramastri Putri mengungkapkan kegembiraan mengikuti karnaval budaya Nusantara. "Saya sangat senang hari ini bisa mengikuti karnaval budaya dan bisa ikut menyemarakkan HUT Kota Yogya bersama teman-teman," ungkapnya. **(Dev)-f**



KR-Istimewa

Siswa SD Muhammadiyah Sapen mengikuti karnaval budaya Nusantara.

JDIH BIRO HUKUM DIY BEKERJASAMA DENGAN KOMISI A DPRD DIY

Sosialisasikan Perda Pendidikan Pancasila dan Perdais Pelestarian Kebudayaan

KEBUTUHAN pendidikan ideologi Pancasila terasa kian mendesak pada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Kekosongan terhadap penguasaan ideologi Pancasila dirasakan pada generasi yang menempuh pendidikan di era reformasi. Pada era tersebut, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran P4 telah dihapuskan, diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bobot pelajaran Pancasila kian kecil.

"Kita merasakan, generasi yang sudah tidak mendapatkan lagi pelajaran PMP, ketika ditanyakan soal Pancasila dan penerapannya, tidak begitu menguasai. Ini memprihatinkan," ungkap Peneliti Pancasila dan Kenegaraan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) Diasma Sandi Swandaru SSos MH dalam Sosialisasi Peraturan Daerah No 1/2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang digelar di Gedung Unit 9 Kepatihan, Kamis (5/10/2023). Kegiatan sosialisasi tersebut digelar oleh Jaringan Doku-



Eko Suwanto, Diasma Swandi Swandaru, Achmad Charis Zubair, Suhasto Nugroho.

mentasi dan Informasi Biro Hukum (JDIH) bekerjasama dengan Komisi A DPRD DIY. Sedangkan moderator Analisis Biro Hukum Setda DIY, Suhasto Nugroho.

Diasma melihat, sejak era reformasi, terdapat pergeseran dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana nilai-nilai demokrasi, pemenuhan hak hukum lebih terlihat. Seperti anak memperkarakan orangtua di pengadilan, sampai orang tidak mampu dihukum hanya karena mencuri kayu.

"Jadi kalau ada masalah, seblentar-bentar dibawa ke hukum. Memang benar masalah keluarga antara anak dan ayah dibawa ke ranah hukum. Tetapi *bener ning ora pener*. Padahal ada sisi lain yang dilihat, aspek kemanu-



siaan yang sebetulnya tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Beberapa kejadian ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan di kehidupan masyarakat mulai berkurang. "Bahkan ditemukan, siswa yang ditanya soal Pancasila tidak bisa menjawab," ujarnya.

Oleh karena itu sangat tepat jika kemudian DIY, melalui DPRD DIY dan Pemda DIY menghasilkan Peraturan Daerah No 1/2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dalam Perda ini mengatur dan memfasilitasi 'Sinau Pancasila' bagi masyarakat DIY.

Adapun sasaran 'Sinau Pancasila', menurut pasal 8 Perda No 1/2022 adalah a) siswa/mahasiswa/peserta



didik; b) organisasi politik; c) organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya; d) pegawai negeri sipil; guru/pendidik; dan f) tokoh agama/masyarakat/adat.

Pembicara lainnya, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengemukakan, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa atau *Way of Life* mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila.

Mantan Ketua Pansus Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD DIY ini mencontohkan praktik nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti misalnya, kegiatan di Posyandu yang dirasakan manfaatnya. Seperti dalam satu kelurahan terdapat sejumlah warga yang mengalami stunting. Para ibu-ibu PKK melalui Posyandu bersama-sama untuk mengentaskan persoalan stunting tersebut.

"Ada yang menyumbang telur, ada yang *urun daging*, dan makanan bergizi lainnya. Ada pula ibu-ibu yang membantu menimbang anak dan memantau perkembangannya," ungkap Eko Suwanto di hadapan para anggota PKK Kelurahan Suryatmajan Kota



KR-Istimewa

Yogyakarta yang hadir dalam sesi pertama sosialisasi di Gedung Unit 9 Kepatihan.

Eko Suwanto juga mencontohkan penerapan nilai Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. "Warga yang menerapkan nilai Pancasila, menghormati agama dan kepercayaan yang dianut warga lainnya," kata Eko Suwanto yang ditugaskan kembali partainya PDI Perjuangan untuk maju menjadi caleg DPRD DIY dalam Pemilu 2024.

Termasuk, ada perbedaan dalam menjalan ibadah dalam

perbedaan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka keduanya bisa saling menjalankan ibadah dan menghormatinya. Di masyarakat, bisa dilihat saling menghormati.

Pelestarian Budaya

Di sesi ke-2, yakni Sosialisasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No 3/2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, Eko Suwanto mencontohkan salah satu budaya yang tumbuh di DIY dan hingga kini terus dilaksanakan. Yaitu budaya gotong royong di masyarakat.

Eko Suwanto menanyakan kepada peserta sesi 2, yakni perwakilan PKK dan Kelurahan Bausasaran tentang perkembangan penanganan stunting. Diungkapkan bahwa jumlahnya terus berkurang dan kini tinggal 8 warga.

Atas laporan tersebut, Eko Suwanto mengajak para peserta untuk memecahkan bersama dengan bergotong royong. Eko Suwanto ikut menjadi bagian dari gotong royong dengan membantu memberi bantuan telur untuk

penyelesaian stunting. Kepada warga yang lain diharapkan ikut juga bergotong royong, misalnya memberi bantuan daging atau makanan bergizi lainnya.

Budayawan Achmad Charis Zubair yang menjadi pembicara sesi ke-2, juga menyampaikan bahwa gotong royong merupakan budaya yang tumbuh di Yogyakarta dan harus dilestarikan.

Dalam kesempatan itu, Achmad Charis Zubair juga mengungkapkan kekuatan budaya, ekonomi dan sosial, sebagian besar ada di kampung-kampung dan bukan di jalan-jalan. Dari data statistik, wilayah Kota Yogyakarta adalah wilayah perkampungan. Jika ada kampung sayur di Kota Yogyakarta dengan lahan yang sempit, maka itu menunjukkan kampung tersebut menunjukkan kerja keras luar biasa. Karena lahan sempit tetapi menghasilkan sayur mayur.

Di sisi lain, di Yogyakarta sejumlah nama jalan dan kampung berbeda dengan nama-nama di luar DIY. Ini karena dalam penamaan jalan dan kampung ada sejarahnya masing-masing. **(*)-d**



KR-Istimewa

Peserta Sosialisasi dari Bausasaran.



KR-Istimewa

Peserta Sosialisasi dari Suryatmajan.